

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan makin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* (Teori Keagenan) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau sering kita sebut sebagai *agency*, yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari (Hamdani, 2016).

Teori keagenan adalah hubungan yang didasarkan oleh suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak (*principal*) untuk memberikan tugas kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. Teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham (Negara) sebagai *principal* sedangkan manajemen sebagai agen. Manajemen yaitu pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham (Dwi et al., 2021).

Dalam studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB), menyebutkan bahwa krisis yang terjadi di Asia disebabkan oleh lemahnya penerapan *corporate governance*. Dengan konsep *good corporate governance* diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Sebagaimana diketahui bahwa penerapan *corporate governance* didasarkan pada teori agensi, yang menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen bertanggung jawab

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak (Swandari & Hadi, 2021).

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan tentang entitas yang beroperasi di sektor publik, seperti pemerintah, lembaga publik, dan organisasi nirlaba yang menerima dana publik. Konsep dasar akuntansi sektor publik bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik serta memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan (Purwati Ari, et al 2023).

Menurut Purwati Ari, et al (2023) ruang lingkup akuntansi sektor publik:

1. Pemerintah dan Organisasi Sektor Publik

Mencakup semua entitas yang beroperasi di sektor publik, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dan badan-badan publik seperti rumah sakit dan perguruan tinggi negeri.

2. Pencatatan Transaksi Keuangan

Mencatat seluruh transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana publik, termasuk pendapatan pajak, sumber-sumber pendanaan lainnya, serta belanja untuk program dan proyek publik.

3. Pengukuran Kinerja

Selain transaksi keuangan, akuntansi sektor publik juga mengukur kinerja entitas publik dalam mencapai tujuan- tujuan mereka. Hal ini termasuk mengukur efisiensi,

4. Pengelolaan Aset Publik

Akuntansi sektor publik juga meliputi pencatatan dan pengelolaan aset publik seperti bangunan, jalan, infrastruktur, dan properti lainnya yang dimiliki oleh entitas sektor publik.

5. Pengungkapan Informasi

Akuntansi sektor publik memastikan bahwa informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan disajikan dengan jelas dan transparan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum.

6. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Sektor Publik

Mencakup kewajiban untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku dalam konteks sektor publik. Standar ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kualitas laporan keuangan.

7. Pengawasan dan Audit

Akuntansi sektor publik melibatkan proses pengawasan dan audit untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi keuangan yang disajikan.

Menurut Haryanto dkk (2017) tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya

mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien.

2.1.3 *Good Corporate Governance*

Menurut Iba & Bariah (2013) isu hangat yang menarik perhatian Pakar ekonomi dan Pelaku bisnis di Indonesia saat ini adalah tentang *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan agar dapat bersaing dengan bebas (Hamdani & Nupikso, 2016).

Menurut Iba & Bariah (2013) beberapa aspek penting dari *Good Corporate Governance* yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yaitu :

a. Keseimbangan Internal

Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris dan direksi. Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut.

b. Keseimbangan Eksternal

Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal

yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholder. Diantaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya.

c. Informasi Tepat dan Benar

Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

d. Keterbukaan Informasi

Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

Menurut Iba & Bariah (2013) tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan pihak eksternal yang meliputi Investor, Kreditur, Pemerintah, Masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*Stakeholder*).

Menurut Hamdani & Nupikso (2016) tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG bagi BUMN adalah mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya

saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum (bagian-bagian tetap dalam struktur organisasi Perusahaan Umum) mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional dan meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Penerapan GCG dapat dilihat dari laporan pengungkapan GCG yang biasanya tersaji dalam laporan tahunan BUMN atau laporan tersendiri terpisah dari laporan tahunan.

Menurut Putri & Trisnaningsih (2023) prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* Suatu perusahaan dianggap telah menerapkan GCG jika telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan efektif dan tepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 terdapat lima prinsip *Good Corporate Governanace* yaitu; *Transparancy* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *Independency* (Kemandirian) dan *Fairness* (Kewajaran).

2.1.3.1 *Transparency* (Transparansi)

Menurut Saifi (2019) Prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip keterbukaan ini sangat penting dalam penerapan *good corporate governance*. Keterbukaan yang memadai diperlukan investor dalam kemampuannya untuk mengambil keputusan terhadap resiko dan keuntungan investasinya. Kurangnya informasi dan tidak adanya keterbukaan dalam sebuah perusahaan, akan membatasi investor untuk memperkirakan nilai resiko ataupun keuntungan dari perubahan modal.

Keterbukaan dalam proses pengambilan suatu keputusan dan pengungkapan informasi yang penting serta relevan tentang perusahaan adalah penting. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan dan signifikan dengan cara yang memadai, transparan, dan akurat, sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah diakses dan dimengerti oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak-hak mereka (Putri & Trisnaningsih, 2023).

2.1.3.2 *Accountability* (Akuntabilitas)

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik, manajer menetapkan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mereka. Akuntabilitas adalah dasar pengendalian sistem yang baik karena mengetahui bagaimana dewan komisaris, direksi, manajer eksekutif dan pemegang saham membagi wewenang (Putri & Trisnaningsih, 2023).

Prinsip ini memberikan jaminan untuk dapat menunjukkan pelaksanaan dan pembatasan kekuasaan yang jelas yang dibebankan pada suatu fungsi. Penerapan

prinsip akuntabilitas harus dikelola dengan baik, namun tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain sehingga kinerja yang berkesinambungan akan tercapai dengan baik Saifi (2019).

2.1.3.3 Responsibility (Pertanggungjawaban)

Kepatuhan pada prinsip perusahaan dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perusahaan diharapkan memberitahu perusahaan bahwa, dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan tersebut juga bertanggung jawab kepada *shareholders* dan *stakeholder* lainnya (Putri & Trisnaningsih, 2023).

Menurut Saifi (2019) Prinsip pertanggungjawaban merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada *stakeholders* lainnya.

2.1.3.4 Independency (Kemandirian)

Kemandirian adalah situasi di mana manajemen perusahaan harus beroperasi dengan standar profesional tanpa adanya konflik kepentingan, serta tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak manapun sesuai dengan hukum yang berlaku (Putri & Trisnaningsih, 2023).

Menurut Saifi (2019) Prinsip Kemandirian merupakan keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini mensyaratkan perusahaan dikelola secara profesional, dan prinsip pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terhindar dari benturan kepentingan dan tekanan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip kemandirian ini memberikan tanggung jawab bagi masing-masing organ perusahaan untuk mampu mengelola perusahaannya secara mandiri dan tanpa intervensi oleh pihak lain.

2.1.3.5 Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

Menurut Saifi (2019) Prinsip kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menuntut adanya suatu perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip kewajaran diharapkan akan membantu mengurangi konflik yang mungkin akan terjadi dalam suatu organ perusahaan.

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) diintegrasikan dalam semua aspek operasional dan tingkatan manajemen perusahaan. Prinsip GCG termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dan kesetaraan, sangat penting untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) sebuah bisnis perusahaan dalam mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*. Dengan menerapkan GCG dengan baik dan dijalankan

secara konsisten akan menimbulkan dampak yang positif bagi perusahaan itu sendiri seperti meningkatnya kinerja perusahaan, menjaga *image* sebuah perusahaan dimata publik maupun para investor sehingga para investor mau menanamkan modalnya dan mensejahterakan para karyawan perusahaan (Putri & Trisnaningsih, 2023).

2.1.3.6 Standar *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan prinsip GCG dalam penyajian laporan keuangan tahunan PT Pertamina (Persero) menggunakan beberapa standar, yaitu: Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Menurut (Kementerian BUMN, 2023) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola BUMN wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero/Organ Perum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam (Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2012) Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN berisi indikator dan parameter penilaian serta evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan ini menetapkan 6 (enam) faktor/aspek penerapan, 43 (empat puluh tiga) indikator, 153 (seratus lima puluh tiga) parameter (sub-indikator), dan 568 (lima ratus enam puluh delapan) faktor uji kesesuaian untuk mengukur tingkat penerapan GCG di BUMN.

- a. Komitmen terhadap GCG: Adanya kode etik, pedoman GCG, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), dll.
- b. Pemegang Saham & RUPS: Keterlibatan aktif namun tidak mencampuri operasional, pelaksanaan RUPS yang sesuai aturan, keputusan transparan.
- c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: Efektivitas fungsi pengawasan, keberadaan komite-komite, independensi, evaluasi mandiri, pelaporan ke RUPS.
- d. Direksi: Pelaksanaan tugas sesuai prinsip GCG, pencapaian kinerja, penyusunan rencana strategis, tanggung jawab sosial, akuntabilitas keputusan.
- e. Transparansi & Pengungkapan Informasi: Publikasi laporan keuangan/audit, website informasi publik, keterbukaan atas kebijakan penting dan risiko.
- f. Aspek Lainnya: Manajemen risiko, kepatuhan hukum, pengendalian internal, penanganan konflik kepentingan, evaluasi berkala GCG.

KPI (*Key Performance Indicator*) mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat berupa kualitas penerapan GCG (Skor Penilaian GCG) menurut Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012, yaitu:

Nilai/Skor	Kategori penilaian
≥ 85	Sangat Baik
76–85	Baik
60–75	Cukup
< 60	Kurang

2.1.4 Kinerja Keuangan

Kinerja (*performance*) ialah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan dari suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan sasaran, standart dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Pabundu, mengidentifikasikan “kinerja sebagai hasil fungsi kegiatan atau pekerjaan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Liow, 2022).

Menurut Liow (2022) Analisis dan interpretasi atas kinerja keuangan akan membantu manajer memecahkan dan sekaligus menjawab masalah-masalah yang timbul dalam keuangan perusahaan. Disamping itu, analisis tersebut dapat dipergunakan untuk membuat keputusan maupun rencana-rencana keuangan perusahaan seperti penanaman modal (investasi), pencarian sumber-sumber dana operasi dan lain-lain.

Secara umum tujuan analisis kinerja keuangan yakni :

1. Untuk memberikan informasi yang lebih luas dan lebih dalam dari pada yang terdapat pada laporan keuangan.
2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara eksplisit dari suatu laporan keuangan.
3. Dapat membandingkan keadaan perusahaan dengan perusahaan lain, dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri tertentu, dan lain-lain.

Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan usaha melalui penerapan kaidah pelaksanaan keuangan yang benar dan tepat. Tujuan dari proses penelitian laporan keuangan dan item terkait laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi dan meramalkan kondisi keuangan perusahaan dan untuk mengevaluasi hasil yang dicapai oleh perusahaan pada saat ini, yang disebut sebagai analisis laporan keuangan (Ardiansyah et al., 2023).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi Kesehatan keuangan Perusahaan dan kinerja Perusahaan (Safitri et al., 2022).

Menurut Safitri et al., (2022) urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.
2. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.
3. Neraca (*Balance Sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal periode tertentu.
4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari

masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu.

2.1.5 Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.1.5.1 Hubungan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan

Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip keterbukaan ini sangat penting dalam penerapan good corporate governance. Keterbukaan yang memadai diperlukan investor dalam kemampuannya untuk mengambil keputusan terhadap resiko dan keuntungan investasinya. Kurangnya informasi dan tidak adanya keterbukaan dalam sebuah perusahaan, akan membatasi investor untuk memperkirakan nilai resiko ataupun keuntungan dari perubahan modal (Saifi, 2019). Oleh karena itu penerapan prinsip transparansi yang baik akan meningkatkan kinerja keuangan serta menghasilkan laporan keuangan tahunan yang jujur, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.5.2 Hubungan Akuntabilitas terhadap Laporan Kinerja Keuangan

Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif (Saifi, 2019). Oleh karena itu jika Perusahaan mampu menerapkan akuntabilitas dengan baik dalam laporan keuangan tahunan, maka laporan tersebut dapat lebih diandalkan dan meningkatkan kepercayaan publik dan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2.1.5.3 Hubungan Responsibilitas terhadap Laporan Kinerja Keuangan

Prinsip pertanggungjawaban merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada stakeholders lainnya (Saifi, 2019). Jadi penerapan prinsip responsibilitas mencerminkan komitmen perusahaan untuk mengelola kinerja keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

2.1.5.4 Hubungan Independensi terhadap Laporan Kinerja Keuangan

Prinsip Kemandirian merupakan keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini mensyaratkan perusahaan dikelola secara professional, dan prinsip pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terhindar dari benturan kepentingan dan tekanan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Saifi, 2019). Dengan menerapkan prinsip independensi, laporan keuangan tahunan disusun dan diaudit secara objektif, tanpa tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Hal ini menjamin bahwa laporan keuangan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat dipercaya.

2.1.5.5 Hubungan Kewajaran dan Kesetaraan terhadap Kinerja Keuangan

Prinsip kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian

dan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menuntut adanya suatu perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip kewajaran diharapkan akan membantu mengurangi konflik yang mungkin akan terjadi dalam suatu organ perusahaan (Saifi, 2019). Penerapan prinsip fairness memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memperoleh akses informasi yang adil dan setara. Hal ini mencerminkan perlakuan yang seimbang tanpa diskriminasi terhadap pemangku kepentingan tertentu yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Angeline Suhandra Dharma dan Andrea Ivanka Limanatan	Judul : Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Di Perusahaan <i>Campina Ice Cream (Study Kasus Tahun 2023)</i> Jurnal : <i>Journal Of Social Science Research</i> Nomor dan Tahun : Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024	Variabel : <i>Good Corporate Governance</i> (X) dan Keandalan Laporan Keuangan (Y) Alat analisis : Regresi Linier Sederhana Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap keandalan laporan keuangan di PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	Variabel yang diteliti sama yaitu <i>Good Corporate Governance</i>	Objek yang diteliti berbeda
2.	Reyhan Daffa Adika dan	Judul : Tinjauan Literatur Prinsip <i>Good Corporate</i>	Variabel : Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	Variabel yang diteliti sama yaitu	Objek yang diteliti berbeda

	Herwiyanti Eliada	<i>Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia</i> Jurnal : <i>Economics and Digital Business Review</i> Nomor dan Tahun : Volume 4 Issue 2 (2023)	(X) dan <i>Penerapan Good Corporate Governance</i> Pada Badan Usaha Milik Negara Alat analisis : Analisis Isi Hasil : Penerapan GCG yang konsisten akan memperkuat posisi kompetitif BUMN untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko secara efisien dan efektif, yang artinya GCG berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja keuangan BUMN.	<i>Good Corporate Governance</i>	
3.	Morinda Salwa, Cindy Aprillia, Pramesti Aruming dan Nasywa Zahirah	Judul : Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Hal Keuangan Terhadap Penyelenggaraan BUMN	Variabel : <i>Good Corporate Governance</i> (X) dan Penyelenggaraan BUMN	Variabel yang diteliti sama yaitu <i>Good Corporate Governance</i>	Objek yang diteliti berbeda

		Jurnal : <i>Journal Of Social Science Research</i> Volume Nomor dan Tahun : Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023	Alat analisis : Analisis deskriptif Hasil : GCG membantu menciptakan tata kelola yang baik, meningkatkan transparansi dan mendorong perusahaan-perusahaan milik negara untuk memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk dalam masalah keuangan.		
4.	M. Iqbal, MA Alya Nabila Junaidi dan Yuliana Putri	Judul : Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Perum Perumnas Regional I Medan Jurnal : Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Nomor dan Tahun : Vol.2, No.1 Januari 2024	Variabel : <i>Good Corporate Governance</i> (X) dan Kinerja Keuangan (Y) Alat analisis : Analisis Deskriptif dan Rasio Keuangan Hasil : Hasil dari penelitian ini Rasio kas masih kurang dari patokan yang ditetapkan BUMN sebesar 35%.	Variabel yang diteliti sama yaitu <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan	Objek yang diteliti berbeda

			Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang dilakukan Perum Perumnas menunjukkan bahwa dunia usaha telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan baik, dan prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan harapan.		
5.	Khairaningrum Mulyanti dan Niken Asyiami Rahma	Judul : Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pt <i>Iron Bird (Blue Bird Group)</i> Jurnal : <i>Land Journal</i> Nomor dan Tahun : Volume 1, Nomor 1, Januari Tahun 2020	Variabel : Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (X) dan Kualitas Laporan Keuangan Alat analisis : Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Korelasi Rank Spearman, Uji Koefisien Determinasi, Analisis regresi linear sederhana, Uji t	Variabel yang diteliti sama yaitu <i>Good Corporate Governance</i>	Variabel Y yang diteliti berbeda dan objek yang diteliti berbeda

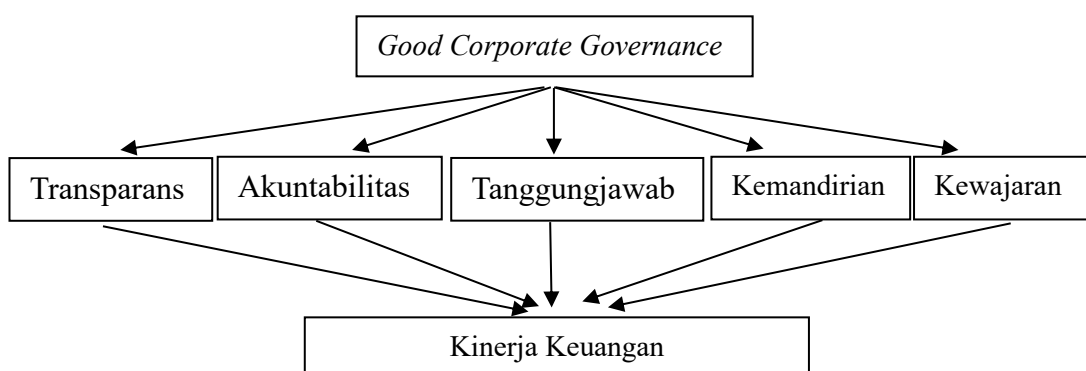
			Hasil : Penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.		
6.	Sintya Al Fataah	Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja BUMN (Studi pada PT. Pertamina Persero RU VI Balongan) Jurnal : Skripsi Tahun : 2019	Variabel : <i>Good Corporate Governance</i> (X) Meningkatkan Kinerja (Y) Alat analisis : Analisis Data Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di Indonesia sistem <i>Good Corporate Governance</i> terus diterapkan diseluruh perusahaan salah satunya BUMN.	Variabel yang diteliti sama yaitu <i>Good Corporate Governance</i>	
7.	Astri Furqani	Judul : Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan	Variabel : Penerapan Prinsip GCG (X) dan Kinerja Perusahaan (Y) Alat analisis : Rasio Keuangan	Variabel yang diteliti sama yaitu <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan	Objek yang diteliti berbeda

		PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep Astri Jurnal : Jurnal “<i>Performance</i>” Bisnis & Akuntansi Nomor dan Tahun : Volume IV, No.1, Maret 1014	Hasil : Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep sudah diterapkan walaupun masih belum sepenuhnya khususnya pada prinsip <i>accountibility</i> dan <i>responsiblity</i>, sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.		
--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Pakpahan et al., (2021) Kerangka pemikiran merupakan turunan dan spesifikasi dari masalah penelitian. Masalah penelitian adalah bagian dari kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dibangun sebagai acuan alur logika sistematis atau model konseptual yang menggambarkan kerangka teoritis atau kerangka operasional suatu penelitian. Kerangka pemikiran membantu peneliti untuk menempatkan dalam konteks yang lebih luas dan membantu dalam menguji rumusan masalah. Kerangka pemikiran berisi teori pokok yang digunakan dalam penelitian dan beberapa di antaranya juga berisi tentang hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain.

Kerangka pemikiran berikut menggambarkan hubungan antar variabel, yang terdiri dari variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* (X) dan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan (Y). Maka digambarkan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran